

Kepemimpinan Perempuan Sebagai Katalis Transformasi Sosial di Kampung Buruh Migran

Unik Dian Cahyawati*

Institut Seni Indonesia

*Korespondensi: unikdian@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja migran menghadapi berbagai bentuk kerentanan, termasuk perdagangan manusia, penipuan, kekerasan fisik dan seksual, serta persoalan administratif yang berdampak pada keluarga mereka. Sayangnya, banyak persoalan ini belum mendapat perhatian formal, sehingga inisiatif dari tokoh akar rumput menjadi sangat penting. Salah satu sosok yang berperan dalam advokasi pekerja migran adalah Maizidah Salas, mantan penyintas yang kini aktif mengadvokasi hak pekerja migran melalui Kampung Buruh Migran di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teori interseksionalitas dan kepemimpinan transformasional untuk menganalisis bagaimana identitas Maizidah sebagai perempuan, mantan pekerja migran, dan aktivis berkontribusi dalam gerakan sosial. Temuan menunjukkan bahwa pengalaman dan kepemimpinannya menjadikannya katalis dalam memperkuat solidaritas pekerja migran, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, membantu pengelolaan keluarga buruh migran di kampung asal, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Studi ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan akar rumput memainkan peran strategis dalam transformasi sosial, khususnya dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja migran.

Kata kunci : Interseksionalitas, perempuan akar rumput, pekerja migran, kepemimpinan, transformasi sosial

ABSTRACT

Migrant workers face various forms of vulnerability, including human trafficking, fraud, physical and sexual violence, and administrative issues that impact their families. Unfortunately, many of these issues have not received adequate formal attention, making grassroots initiatives highly essential. One prominent figure in migrant worker advocacy is Maizidah Salas, a former survivor who now actively advocates for migrant workers' rights through Kampung Buruh Migran in Kaliwiro, Wonosobo. This study employs a case study method, utilizing intersectionality theory and transformational leadership theory to analyze how Maizidah Salas' identity as a woman, former migrant worker, and activist contributes to the social movement. The findings indicate that her experiences and leadership position her as a catalyst in strengthening migrant worker solidarity, raising awareness of their rights, helping to manage migrant workers' families in their home villages and promoting more inclusive policy changes. This study affirms that grassroots women's leadership plays a strategic role in social transformation, particularly in advocating for justice and protection for migrant workers.

Keywords: Intersectionality, grassroots women, migrant workers, leadership, social transformation

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang signifikan, baik perempuan maupun laki-laki, yang bekerja di berbagai negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika. Namun, para pekerja migran ini menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah pekerja migran dari Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun

2014, tercatat sebanyak 1.530 pekerja migran yang diberangkatkan, sedangkan pada tahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.957 orang. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pekerja migran laki-laki dan perempuan, di mana tercatat 1.839 perempuan bekerja sebagai pekerja migran, sedangkan jumlah laki-laki hanya mencapai 60 orang (Katadata, 2019 dalam Khafifi, 2023).

Jumlah pekerja migran yang signifikan tersebut memiliki beberapa permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Salah satu permasalahan utama adalah kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Situasi dan kondisi pekerja migran asal Wonosobo sangat rawan terhadap TPPO, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai prosedur migrasi yang aman dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat (SBMI, 2024). Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran baik laki-laki dan perempuan (terutama perempuan) bukan hanya mengenai masalah publik dan makro, melainkan juga masalah domestik yang seringkali diabaikan oleh berbagai pihak.

Salah satu permasalahan domestik yang sering muncul adalah kurangnya pola pengasuhan yang optimal bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mayoritas tenaga kerja migran asal Indonesia merupakan perempuan yang bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44% telah menikah dan 14,5% berada dalam status perceraian. Dengan demikian, sekitar 58,5% di antaranya memiliki anak yang berisiko menghadapi berbagai tantangan akibat minimnya pendampingan langsung dari orang tua. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang menjadi pekerja migran rentan mengalami berbagai kesulitan, termasuk dalam hal kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. UNICEF mengategorikan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bermigrasi sebagai kelompok yang rentan menghadapi berbagai hambatan dalam aspek-aspek tersebut (Kinasih, dkk. 2023).

Perempuan akar rumput adalah mereka yang berada di lapisan paling bawah dalam struktur social seringkali berada dalam komunitas yang kurang mendapat perhatian atau akses terbatas terhadap berbagai sumber daya seperti ekonomi, pendidikan, atau politik. Meskipun sering kali tidak terlihat dalam pengambilan keputusan besar, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat dan mempertahankan solidaritas sosial dalam kelompoknya. Maizidah Salas, sebagai salah satu mantan pekerja migran sekaligus penyintas telah mengalami berbagai tantangan dan

permasalahan yang terkait dengan kondisi pekerja migran, yang mencakup isu-isu eksploitasi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya perlindungan sosial selama masa kerjanya di luar negeri. Kini, Maizidah Salas berperan sebagai penggerak sosial, mencerminkan sosok perempuan akar rumput yang aktif dalam memimpin dan memperjuangkan hak-hak perempuan dari lapisan bawah, terutama di komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Sebagai agen perubahan sosial, Maizidah Salas menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan akar rumput memiliki kontribusi penting meskipun sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang lebih besar. Melalui kepemimpinan dan pengorganisasian di komunitasnya, Maizidah Salas menunjukkan kemampuan perempuan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan membangun solidaritas di antara sesama anggota komunitas, serta menciptakan perubahan yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maizidah Salas sebagai pemimpin transformasional dalam advokasi pekerja migran di Indonesia. Dengan menggunakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana identitas Maizidah Salas sebagai perempuan, mantan pekerja migran, dan aktivis membentuk strategi advokasinya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Selain itu, teori kepemimpinan transformasional digunakan untuk memahami bagaimana pendekatan kepemimpinan yang diterapkan oleh Maizidah Salas berkontribusi pada perubahan sosial di tingkat komunitas dan kebijakan.

Secara khusus, penelitian ini mengkaji: 1) bagaimana pengalaman ketertindasan memengaruhi strategi kepemimpinan Maizidah Salas; dan (2) bagaimana kepemimpinan transformasionalnya berdampak terhadap solidaritas komunitas pekerja migran. Dengan mengintegrasikan teori interseksionalitas dan kepemimpinan transformasional, penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan akar rumput dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi sosial berbasis pengalaman kolektif dan solidaritas komunitas.

STUDI PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Pusparani dan Soetjipto (2017) dalam *Jurnal Perempuan* mengkaji bagaimana enam perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia mampu memberdayakan diri melalui proses migrasi yang mereka alami. Studi ini menekankan pentingnya pengalaman personal dan kolektif perempuan migran sebagai modal sosial dalam membangun kesadaran kritis dan memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini relevan dengan konteks Maizidah Salas yang juga

menjadikan pengalaman migrasinya sebagai fondasi kepemimpinan dan advokasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman hidup perempuan migran dapat menjadi sumber kekuatan untuk membangun strategi advokasi berbasis komunitas. Sigiro (2021) dalam artikelnya di *Jurnal Perempuan* menyoroti peran serikat pekerja dalam mendorong pencegahan kekerasan seksual di dunia kerja, namun juga mengungkapkan tantangan struktural yang dihadapi dalam pelibatan perempuan. Sigiro mencatat bahwa masih kuatnya budaya maskulin dan minimnya representasi perempuan dalam kepemimpinan menjadi hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan gender di ranah organisasi kerja. Hal ini menguatkan temuan dalam studi tentang Maizidah Salas, di mana upayanya membangun kepemimpinan transformatif juga menghadapi hambatan dari struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan akar rumput dalam pengambilan kebijakan.

METODOLOGI

Artikel ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui dua metode utama. Pertama, pengumpulan berita dari berbagai media yang membahas perjalanan Maizidah Salas, mulai dari pengalaman sebagai penyintas pekerja migran hingga perannya sebagai penggerak sosial. Sumber media yang digunakan mencakup laporan investigatif, wawancara eksklusif, serta kajian akademis yang menyoroti kontribusinya dalam advokasi pekerja migran perempuan. Data ini dianalisis untuk memahami bagaimana narasi mengenai Maizidah Salas dibentuk dan dikontekstualisasikan dalam diskursus publik. Kedua, wawancara langsung dengan Maizidah Salas dilakukan guna memperoleh perspektif mendalam mengenai pengalaman, tantangan, serta strategi kepemimpinan yang ia terapkan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran perempuan. Wawancara ini tidak hanya berfokus pada perjalanannya secara individu, tetapi juga pada dinamika komunitas yang ia bangun, nilai-nilai solidaritas yang diterapkan, serta bagaimana interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan memengaruhi perjuangannya.

Dengan mengombinasikan data yang diperoleh melalui media dan wawancara langsung, artikel ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih holistik mengenai kepemimpinan perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap aspek interseksionalitas yang

membentuk pengalaman Maizidah Salas sebagai seorang perempuan, mantan pekerja migran, dan aktivis sosial.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw dan teori kepemimpinan transformasional. Teori interseksionalitas digunakan untuk memahami bagaimana berbagai faktor identitas sosial—termasuk gender, kelas, dan status migrasi—mempengaruhi pengalaman Maizidah Salas sebagai pekerja migran perempuan serta bagaimana interseksi ketidakadilan tersebut mendorongnya menjadi penggerak sosial. Teori kepemimpinan transformasional digunakan untuk mengkaji bagaimana Maizidah Salas membentuk dan mengembangkan kepemimpinan berbasis solidaritas komunitas serta menginspirasi perubahan struktural di kalangan pekerja migran perempuan. Bass menekankan bahwa pemimpin transformasional mampu membangun visi yang kuat dan memotivasi komunitasnya untuk melakukan perubahan sosial. Selain itu, perspektif feminis dari Alice H. Eagly dan Linda L. Carli (2007) menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lebih kolaboratif, berorientasi pada transformasi sosial, dan berbasis nilai-nilai keadilan. Mereka berpendapat bahwa pemimpin perempuan sering kali membangun solidaritas komunitas, menggunakan pendekatan partisipatif, serta mengutamakan empati dalam kepemimpinan mereka. Dalam konteks Maizidah Salas, perspektif ini memperkuat gagasan bahwa kepemimpinan perempuan akar rumput tidak hanya mengandalkan pengaruh individu, tetapi juga membangun jaringan solidaritas dan perubahan berbasis komunitas.

Teori-teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana Maizidah Salas, dengan latar belakang pengalaman dan identitas sosial yang berlapis, mampu mengembangkan kepemimpinan yang bersifat kolektif dan transformatif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan akar rumput sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika kepemimpinan transformasional di kalangan pekerja migran, serta bagaimana pengalaman ketertindasan dan solidaritas komunitas berkontribusi dalam membentuk strategi advokasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena migrasi tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonosobo, merupakan bagian dari tren lebih luas yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pedesaan di sebuah kabupaten. Kabupaten Wonosobo, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta

terbatasnya lapangan pekerjaan formal baik laki-laki maupun terutama bagi perempuan, menjadi salah satu daerah dengan angka migrasi tenaga kerja yang signifikan. Dorongan utama bagi mereka untuk bermigrasi berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga, minimnya peluang kerja di tingkat lokal, serta harapan atas kehidupan yang lebih baik melalui pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan di dalam negeri (Silvey, 2004). Namun, di tengah harapan tersebut, pekerja migran baik perempuan maupun laki-laki masih dihadapkan pada tantangan serius, termasuk eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan upah, terutama bagi pekerja migran perempuan yaitu risiko kekerasan berbasis gender yang masih menjadi isu krusial.

Tabel 1. Jumlah penempatan pekerja migran dari Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2018 – Maret 2021

Tahun	Jumlah Penempatan Pekerja Migran
2018	2.440 orang
2019	2.203 orang
2020	1.180 orang
2021*	267 orang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo diskominfo.wonosobokab.go.id

Tabel di atas menunjukkan jumlah pekerja migran laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wonosobo yang terdata di Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah tersebut termasuk menunjukkan angka yang tinggi meskipun terdapat kecenderungan penurunan jumlah pekerja migran asal Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 hingga 2021. Penurunan yang drastis pada tahun 2020 dan 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang membatasi mobilitas internasional serta memperketat regulasi tenaga kerja migran.

Penurunan jumlah pekerja migran dari Kabupaten Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir tidak menghilangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran. Para pekerja migran, baik laki-laki maupun perempuan, masih mengalami berbagai kendala, mulai dari kondisi kerja yang tidak layak hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Selain itu, proses migrasi yang kompleks dan biaya keberangkatan yang tinggi juga menjadi beban tersendiri bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Oleh karena itu, meskipun migrasi tenaga kerja tetap menjadi pilihan bagi banyak warga Wonosobo untuk meningkatkan taraf hidup, risiko dan

tantangan yang menyertainya tidak bisa diabaikan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Tabel 2. Permasalahan yang Dihadapi Pekerja Migran Wonosobo Secara Umum

	Deskripsi		Tahun Berita
Perdagangan Orang (TPPO)	Kasus pekerja migran yang diberangkatkan melalui jalur ilegal dan menjadi korban TPPO.	https://sbmi.or.id/migrant-fest-pelindungan-pekerja-migran-dari-desa/	2024
Eksplorasi Kerja	Upah tidak dibayar, jam kerja melebihi batas wajar, kerja paksa.	https://forjusticewithoutborders.org/justice-without-borders-dan-kita-institute-wonosobo-kupas-tuntas-tantangan-pekerja-migran-kala-pandemi/?utm_source=chatgpt.com	2021
Kekerasan Berbasis Gender	Kekerasan fisik, pelecehan seksual yang dialami pekerja migran perempuan di sektor domestik.	https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5534540/pekerja-migran-kerap-alami-kekerasan-hingga-sandang-disabilitas-bahkan-kematian	
Minimnya Akses Informasi Legal	Banyak calon pekerja migran tidak memahami prosedur migrasi aman, sehingga rentan menjadi korban penipuan	https://nasional.kompas.com/read/2024/12/26/20262621/95-persen-pekerja-migran-ri-di-luar-negeri-korban-kerja-nonprosedural? https://jateng.tribunnews.com/2024/05/21/penipuan-kerja-luar-negeri-5-pencari-kerja-asal-wonosobo-batal-terbang-ke-serbia	2024
Masalah Keluarga yang Ditinggalkan	Anak terlantar, perceraian, serta tekanan ekonomi keluarga akibat migrasi yang berkepanjangan.	https://media.neliti.com/media/publications/539218-none-2dc6c146.pdf?	2018
Masalah Keluarga yang Ditinggalkan	Anak terlantar, perceraian, serta tekanan ekonomi keluarga akibat migrasi yang berkepanjangan.	https://media.neliti.com/media/publications/539218-none-2dc6c146.pdf?	2018

Tabel di atas menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran asal Wonosobo, baik laki-laki maupun perempuan, selama bekerja di luar negeri. Salah satu masalah yang paling mengancam keselamatan adalah perdagangan orang (TPPO), di mana banyak pekerja

diberangkatkan melalui jalur ilegal dan menjadi korban eksploitasi. Selain itu, eksploitasi kerja juga menjadi tantangan utama, dengan kasus pekerja yang tidak menerima upah yang layak, dipaksa bekerja melebihi jam kerja normal, atau bahkan mengalami kerja paksa. Kekerasan berbasis gender juga masih sering terjadi, terutama pada pekerja perempuan di sektor domestik yang rentan terhadap pelecehan dan kekerasan fisik. Selain menghadapi tantangan langsung di tempat kerja, pekerja migran juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang memadai, sehingga banyak di antara mereka yang tidak sepenuhnya memahami prosedur migrasi yang aman. Kurangnya pemahaman ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik penipuan oleh agen ilegal serta pemberangkatan yang tidak sesuai dengan regulasi. Di samping itu, dampak migrasi tidak hanya dirasakan oleh pekerja migran itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Berbagai permasalahan sosial, seperti anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan yang memadai, meningkatnya angka perceraian, serta tekanan ekonomi akibat ketidakpastian pendapatan pekerja migran, menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran perlu mencakup tidak hanya aspek ketenagakerjaan, tetapi juga sistem dukungan sosial bagi keluarga yang terdampak migrasi.

Dari Penyintas ke Penggerak

Dalam konteks kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran di Kabupaten Wonosobo, muncul sosok Maizidah Salas dari Kecamatan Kaliwiro yang awalnya merupakan seorang penyintas berbagai bentuk ketidakadilan sebagai pekerja migran. Sebagai perempuan yang bekerja di sektor domestik, ia mengalami eksploitasi kerja dalam bentuk upah yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, dan minimnya perlindungan hukum, sebagaimana yang juga dialami oleh banyak pekerja migran perempuan lainnya (BP2MI, 2023). Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap informasi legal yang membuatnya rentan terhadap praktik perdagangan orang (SBMI, 2024). Namun, berbeda dari banyak pekerja migran yang mengalami keterasingan sosial setelah kembali ke kampung halaman (Komnas Perempuan, 2022), Maizidah Salas justru mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk mengembangkan diri dan menjadi aktivis di lingkungan pekerja migran. Dukungan ini menjadi faktor penting yang membantunya untuk bangkit dan bertransformasi menjadi pemimpin gerakan pekerja migran di Kabupaten Wonosobo.

Dukungan dari lingkungan terutama keluarga dan lingkungan Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo membuat Maizidah Salas mampu mengorganisir perjuangan pekerja migran melalui pendekatan berbasis komunitas, yang kemudian melahirkan inisiatif Kampung Pekerja Migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro. Pengalaman Maizidah menunjukkan bahwa meskipun pekerja migran perempuan menghadapi tantangan struktural dalam bentuk kebijakan migrasi yang diskriminatif, minimnya perlindungan hukum, dan eksploitasi kerja, keberadaan dukungan sosial dapat menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan dan memperjuangkan hak-hak mereka (Crenshaw, 1989). Interseksionalitas tidak hanya memperjelas bentuk diskriminasi yang dihadapi pekerja migran tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dimobilisasi untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Maizidah Salas tidak hanya bertahan dalam sistem yang menindas, tetapi juga memanfaatkan pengalaman dan kesadarannya untuk menginisiasi perubahan struktural bagi pekerja migran di Kabupaten Wonosobo. Kesadarannya berkembang melalui pengalaman personal yang kemudian diperkuat oleh keterlibatannya dalam jaringan aktivisme pekerja migran, seperti Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) (AntaraneWS, 2018). Dalam perspektif interseksionalitas, perjuangan Maizidah Salas menegaskan bahwa perempuan pekerja migran tidak hanya mengalami eksploitasi sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi yang secara struktural menempatkan mereka pada posisi subordinat (Hooks, 2000). Faktor gender, kelas sosial, serta status hukum mereka sebagai pekerja di luar negeri menciptakan bentuk-bentuk penindasan berlapis yang menghambat akses terhadap perlindungan hukum dan kesejahteraan ekonomi (Crenshaw, 1989). Namun, melalui kesadaran kritis, pengalaman ini dapat dikonversi menjadi modal sosial dan politik yang memperkuat perjuangan pekerja migran dalam menuntut keadilan.

Transformasi peran Maizidah Salas dari penyintas menjadi penggerak perubahan tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan kondisi individu pekerja migran, tetapi juga terhadap perubahan kebijakan di tingkat komunitas. Keberhasilannya dalam memperjuangkan hak pekerja migran berkontribusi pada terbentuknya Kampung Pekerja Migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, yang kini menjadi pusat advokasi dan pemberdayaan pekerja migran (SBMI Wonosobo, 2023). Kampung ini tidak hanya menyediakan akses informasi legal bagi calon pekerja migran tetapi juga membangun sistem perlindungan berbasis komunitas yang dapat memitigasi risiko eksploitasi

tenaga kerja. Dengan demikian, perjuangan Maizidah Salas menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan pekerja migran dapat dikontekstualisasikan dalam analisis interseksional yang lebih luas, di mana faktor struktural yang menindas dapat dikonversi menjadi kekuatan kolektif dalam membangun solidaritas dan gerakan sosial yang berkelanjutan.

Melalui perspektif interseksionalitas, perjuangan Maizidah Salas tidak dapat dipahami hanya dalam satu aspek, seperti kelas sosial atau gender, tetapi harus dilihat sebagai interseksi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Sebagai seorang perempuan dari pedesaan, Maizidah Salas mengalami kerentanan ganda, baik sebagai perempuan yang bekerja di sektor domestik dengan perlindungan hukum yang minim, maupun sebagai individu yang berasal dari kelas ekonomi bawah, yang mendorongnya untuk bermigrasi sejak awal. Perempuan pekerja migran Indonesia sering kali menghadapi eksploitasi berlapis, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Sementara kontribusi mereka terhadap ekonomi keluarga dan negara signifikan, mereka tetap berada dalam posisi subordinasi dalam relasi kuasa dengan majikan maupun pemangku kebijakan (Wuryandari, 2022).

Interseksionalitas dalam pengalaman pekerja migran juga tampak dalam perbedaan risiko yang dihadapi laki-laki dan perempuan. Sementara pekerja migran laki-laki umumnya bekerja di sektor industri dan konstruksi dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi, pekerja migran perempuan lebih sering terjebak dalam eksploitasi berbasis gender, seperti kekerasan seksual dan diskriminasi upah. Maizidah memahami ketidakadilan ini tidak hanya sebagai persoalan individu, tetapi sebagai bagian dari sistem yang dialami oleh para pekerja migran perempuan.

Kesadaran kritis yang dimiliki Maizidah Salas mendorongnya untuk mendirikan Kampung Pekerja Migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, yang menjadi pusat advokasi dan pemberdayaan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Kampung ini menjadi model bagi komunitas lain dalam memberikan akses informasi legal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bagi para penyintas eksploitasi tenaga kerja. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran hukum pekerja migran, tetapi juga dalam membangun sistem perlindungan sosial berbasis komunitas. Berdasarkan data SBMI Wonosobo, sejak adanya Kampung Pekerja Migran, jumlah kasus perdagangan orang dan pemberangkatan ilegal di daerah tersebut mengalami penurunan signifikan. Dengan langkah-langkah tersebut, perjuangan pekerja migran di Wonosobo

mulai menemukan titik terang di bawah kepemimpinan Maizidah Salas, yang tidak hanya menjadi penyintas, tetapi juga penggerak perubahan sosial bagi komunitasnya (Kompas, 2022).

Pada tahun 1998, pada usia 18 tahun, Maizidah Salas memulai pekerjaannya sebagai pekerja migran di Korea Selatan. Namun, proses migrasinya diwarnai oleh hambatan signifikan, termasuk pemalsuan usia dan alamat oleh agen perekrutan, yang mengakibatkan dirinya menjadi korban perdagangan manusia. Di Korea, ia bekerja di sektor domestik dengan kondisi kerja yang eksploitatif, seperti jam kerja berlebihan dan upah yang tidak dibayar. Pengalaman ini mencerminkan kerentanan yang dihadapi oleh banyak pekerja migran perempuan, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah (Kompas, 2022).

Menurut teori interseksionalitas, pengalaman Maizidah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, seperti gender atau kelas sosial, tetapi oleh interseksi berbagai identitas sosial yang saling berkaitan. Sebagai perempuan muda dari pedesaan dengan latar belakang ekonomi terbatas, ia menghadapi kerentanan ganda: diskriminasi berbasis gender dan eksploitasi ekonomi. Interseksionalitas ini menempatkannya pada posisi subordinat dalam struktur sosial dan ekonomi, meningkatkan risiko terhadap praktik-praktik eksploitatif seperti perdagangan manusia.

Pada fase ini, Maizidah Salas menghadapi krisis yang umum dialami oleh banyak pekerja migran perempuan, terutama mereka yang mengalami eksploitasi dan ketidakadilan selama bekerja di luar negeri. Krisis ini ditandai oleh perasaan tidak berdaya akibat kondisi kerja yang menindas, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, serta keterasingan sosial baik di negara tempat bekerja maupun setelah kembali ke tanah air. Situasi ini semakin kompleks karena pekerja migran perempuan sering kali menghadapi diskriminasi ganda, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam komunitas asal mereka. Jika tidak ditangani dengan tepat, dampak psikososial dari pengalaman ini dapat berkembang menjadi trauma berkepanjangan, yang tidak hanya mempengaruhi individu secara emosional dan mental, tetapi juga menghambat proses reintegrasi sosial dan ekonomi mereka di masyarakat.

Pada tahun 2001, Maizidah Salas berangkat ke Taiwan sebagai pekerja migran melalui perantara agen penyalur tenaga kerja. Harapannya untuk memperoleh kondisi kerja yang layak tidak terwujud, karena ia justru mengalami eksploitasi tenaga kerja dalam bentuk jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi yang setimpal, tidak diberikan hak atas hari libur, serta keterbatasan

dalam menjalankan praktik keagamaan. Situasi ini semakin kompleks ketika muncul kendala administratif terkait izin kerja yang menyebabkan ia harus dipulangkan ke Indonesia melalui intervensi agen tenaga kerja. Dalam proses pemulangannya, Maizidah Salas mengalami pelecehan seksual oleh agen yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungannya untuk kembali ke Indonesia.

Pengalaman yang dialami Maizidah Salas mencerminkan kondisi struktural yang menempatkan pekerja migran perempuan dalam posisi subordinat dalam hierarki ketenagakerjaan transnasional. Dalam kerangka teori interseksionalitas yang dikemukakan oleh Crenshaw (1989), kondisi ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari persinggungan berbagai faktor penindasan, seperti gender, kelas sosial, dan status kewarganegaraan, yang memperparah kerentanan perempuan migran dalam sistem ekonomi global. Pekerja migran perempuan umumnya berada dalam sektor kerja informal, yang tidak hanya rentan terhadap eksploitasi ekonomi, tetapi juga menghadapi risiko kekerasan berbasis gender yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kasus yang dialami Maizidah Salas memperlihatkan bagaimana perempuan pekerja migran berada dalam persimpangan berbagai bentuk penindasan yang saling memperkuat, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga kekerasan berbasis gender. Posisi mereka yang sering kali tidak diakui dalam hukum ketenagakerjaan formal membuat akses terhadap perlindungan hukum menjadi terbatas, sehingga banyak kasus kekerasan dan pelecehan tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan, terutama yang bekerja di sektor domestik, lebih rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan pekerja migran laki-laki. Dalam konteks ini, pengalaman Maizidah tidak hanya mencerminkan kondisi individu, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja migran perempuan.

Kepemimpinan Transformasional Maizidah Salas dan Kampung Pekerja Migran sebagai Katalis Transformasi Sosial yang Inklusif

Bass (1990) memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional yang berfokus pada bagaimana seorang pemimpin dapat menggerakkan perubahan besar melalui inspirasi, motivasi, dan pengaruhnya dalam suatu organisasi atau komunitas. Maizidah Salas, seorang mantan pekerja migran yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi, menunjukkan karakteristik

kepemimpinan transformasional dalam upayanya memberdayakan pekerja migran perempuan. Dalam wawancara pada Februari 2025, Maizidah menyatakan,

"Saya tidak ingin pengalaman saya hanya menjadi cerita sedih. Saya ingin memastikan bahwa perempuan pekerja migran lainnya memiliki perlindungan dan akses terhadap hak-hak mereka."

Pernyataan ini mencerminkan motivasi inspirasional, di mana pemimpin tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi tetapi juga menggerakkan orang lain menuju perubahan positif.

Selain itu, kepemimpinan transformasional menekankan pengaruh idealis, di mana pemimpin menjadi teladan bagi komunitasnya. Maizidah Salas mendirikan Kampung Pekerja Migran sebagai pusat edukasi dan advokasi bagi pekerja migran di Wonosobo. Ia menyatakan,

"Ketika saya kembali, saya melihat bahwa banyak perempuan yang menghadapi masalah yang sama. Saya sadar, saya harus melakukan sesuatu", (Wawancara Februari, 2025).

Ini menunjukkan bahwa ia menggunakan pengaruh pribadinya untuk menciptakan kesadaran kolektif di antara pekerja migran perempuan, sejalan dengan temuan Eagly dan Carli (2007) yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung berbasis pada solidaritas komunitas.

Stimulasi intelektual, yaitu mendorong komunitas untuk berpikir kritis terhadap masalah yang mereka hadapi, juga merupakan komponen penting dalam kepemimpinan transformasional. Maizidah Salas mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya akses informasi mengenai hak-hak dan prosedur migrasi yang aman.

"Banyak dari kami tidak tahu hak-hak kami ketika bekerja di luar negeri. Kami hanya mengikuti apa kata agen," (Wawancara Februari, 2025).

Dengan memberikan edukasi hukum dan keterampilan advokasi, Maizidah Salas membangun kapasitas komunitas untuk memahami dan memperjuangkan hak mereka sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Bass dan Avolio (1994) tentang pentingnya pemberdayaan dalam kepemimpinan.

Namun, penerapan kepemimpinan transformasional tidak selalu berjalan mulus. Maizidah Salas menghadapi penolakan dari beberapa pemangku kebijakan ketika berusaha menyuarakan aspirasi pekerja migran dalam diskusi pengambilan kebijakan.

"Saya sering dianggap tidak kompeten hanya karena saya berasal dari latar belakang pekerja migran, padahal saya memahami masalah ini lebih baik daripada mereka yang tidak pernah mengalami langsung," (Wawancara Februari, 2025).

Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan transformasional memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan, bias struktural seperti stereotip gender dan diskriminasi kelas masih menjadi tantangan signifikan.

Untuk menganalisis kendala tersebut, teori interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989) dapat digunakan. Teori ini menekankan bahwa identitas sosial seperti gender, ras, dan kelas saling berinteraksi dan menciptakan pengalaman unik dari penindasan atau privilese. Dalam kasus Maizidah, sebagai perempuan, mantan pekerja migran, dan individu dari latar belakang ekonomi rendah, ia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang saling berkelindan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal "Gender and Leadership" oleh Carli dan Eagly (2011), yang menyatakan bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan tambahan dalam posisi kepemimpinan karena stereotip gender dan ekspektasi sosial.

Kendala lain yang dihadapi oleh pemimpin transformasional seperti Maizidah adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam komunitas itu sendiri. Beberapa anggota komunitas mungkin merasa nyaman dengan status quo atau takut akan konsekuensi dari perubahan yang diusulkan. Maizidah menyatakan bahwa tidak semua orang siap untuk perubahan. Ada yang merasa takut atau ragu untuk mengambil langkah baru. Ini menunjukkan bahwa selain menghadapi penolakan dari pihak eksternal, pemimpin transformasional juga harus mampu mengatasi keraguan dan ketakutan dari dalam komunitasnya sendiri.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi pemimpin transformasional untuk mengembangkan strategi yang inklusif dan adaptif. Pendekatan partisipatif, di mana anggota komunitas dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan yang diusulkan. Selain itu, membangun jaringan dukungan dengan organisasi lain dan mencari aliansi strategis dapat memperkuat posisi pemimpin dalam menghadapi hambatan struktural. Sebagaimana disarankan oleh Bass dan Avolio (1994), pemimpin transformasional harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika lingkungan mereka untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Perjalanan Maizidah Salas dalam memahami hak-hak pekerja migran dimulai dari interaksi dengan rekan-rekannya. Dalam wawancara, ia mengungkapkan,

"Saya banyak belajar dari teman-teman sesama pekerja migran. Kami saling berbagi informasi tentang hak-hak kami dan cara melindungi diri", (Wawancara Februari, 2025).

Melalui diskusi ini, Maizidah menyadari pentingnya pengetahuan tentang hak-hak pekerja dan mulai mendalami lebih lanjut. Proses pembelajaran ini menjadi landasan baginya untuk mendirikan Kampung Pekerja Migran, sebuah pusat edukasi dan advokasi bagi pekerja migran di Wonosobo.

Dalam konteks kepemimpinan transformasional, tantangan yang dihadapi Maizidah menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini efektif dalam mendorong perubahan, hambatan struktural seperti bias gender dan stereotip sosial masih menjadi penghalang signifikan. Penelitian oleh Carli dan Eagly (2011) menegaskan bahwa pemimpin perempuan seringkali menghadapi resistensi yang lebih besar dibandingkan dengan rekan pria mereka, terutama ketika mereka mencoba menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari norma tradisional. Untuk mengatasi kendala tersebut, penting bagi pemimpin perempuan seperti Maizidah untuk terus membangun jaringan dukungan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perspektif interseksional dalam kepemimpinan. Dengan memahami dan mengintegrasikan berbagai aspek identitas dan pengalaman, pemimpin dapat lebih efektif dalam merancang strategi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas mereka. Pusparani dan Soetjipto (2017) mengemukakan bahwa pekerja migran perempuan dapat mengembangkan agensi dengan mengambil keputusan bermigrasi secara mandiri, melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas, serta terlibat aktif dalam advokasi kebijakan.

Tantangan dalam Menjadi Aktivistis Pekerja Migran

Meskipun inisiatif yang dijalankan Maizidah Salas dalam membangun Kampung Pekerja Migran telah memberikan dampak besar bagi pekerja migran di Indonesia, perjuangannya sebagai aktivis tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Hambatan yang muncul tidak sampai menghentikan kegiatan sepenuhnya, tetapi tetap memengaruhi kelancaran proses advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan dukungan kebijakan atau kurangnya respons positif dari pihak legislatif, tetapi juga dari faktor struktural dan personal yang menyebabkan banyak calon aktivis kesulitan untuk bertahan dalam gerakan advokasi pekerja migran.

Dalam wawancara yang dilakukan, Maizidah Salas menyoroti bahwa banyak mantan pekerja migran yang memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran, tetapi terhalang

oleh berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan finansial. Berbeda dengan pekerjaan lain yang memberikan penghasilan tetap, menjadi aktivis sering kali tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak calon aktivis yang akhirnya harus memilih untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk terus aktif dalam advokasi pekerja migran. Seperti yang disampaikan oleh Maizidah:

"Menjadi aktivis itu kan bukan orang yang bekerja mendapat gaji... kalau dikaitkan dengan finansial, orang yang melakukan pekerjaan tapi tidak mendapatkan upah itu kan juga tidak banyak ya, karena nanti kebutuhan ekonomi dianya sendiri atau keluarganya itu menjadi pertanyaan, siapa yang akan support?" (Wawancara Februari, 2025).

Faktor ekonomi menjadi salah satu tantangan utama bagi individu yang ingin terlibat dalam gerakan advokasi pekerja migran. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Anggaunitakiranantika (2022), perempuan yang berasal dari kelompok ekonomi lemah sering kali menghadapi hambatan dalam partisipasi sosial karena mereka harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan dengan keterlibatan dalam aktivisme sosial. Kondisi ini menyebabkan hanya individu yang memiliki privilese tertentu yang dapat bertahan sebagai aktivis dalam jangka panjang (Anggaunitakiranantika, 2022).

Selain itu, dukungan dari keluarga juga menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan perjuangan seorang aktivis. Maizidah menekankan bahwa keberhasilannya dalam advokasi pekerja migran tidak lepas dari dukungan penuh dari keluarganya. Sayangnya, tidak semua mantan pekerja migran yang ingin menjadi aktivis mendapatkan restu dari keluarga mereka. Dalam banyak kasus, keluarga lebih menginginkan mereka untuk fokus pada kehidupan ekonomi dan tanggung jawab domestik, daripada terlibat dalam kegiatan yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan material.

Di samping faktor ekonomi dan keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar. Banyak calon aktivis yang berasal dari komunitas yang kurang memahami pentingnya advokasi pekerja migran. Dalam kondisi seperti ini, mereka sering kali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, yang menyebabkan motivasi mereka perlahan menurun. Maizidah menjelaskan:

"Banyak orang yang sebenarnya menginginkan untuk menjadi aktivis hanya saja ada beberapa tantangan yang tidak atau belum bisa diselesaikan... misalkan lingkungannya

tidak mendukung dia, dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak banyak pekerja migrannya, lingkungannya tidak banyak mendukung dia" (Wawancara Februari, 2025).

Faktor lain yang signifikan adalah beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh mantan pekerja migran. Sebagian besar dari mereka memiliki tanggung jawab keluarga yang besar, termasuk membiayai anak-anak dan orang tua di kampung halaman. Situasi ini membuat mereka tidak memiliki banyak waktu dan energi untuk terlibat dalam advokasi. Studi yang dilakukan oleh Suryadi et al. (2022) menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran menghadapi berbagai masalah potensial, yang dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga dan membatasi partisipasi mantan pekerja migran dalam kegiatan sosial setelah kembali ke tanah air.

Di luar faktor internal, tantangan dari pihak eksternal seperti kebijakan pemerintah dan pengusaha juga turut menjadi penghambat. Meskipun ada kemajuan dalam regulasi tenaga kerja migran, masih banyak peraturan yang lebih menguntungkan pihak perusahaan penyalur tenaga kerja dibandingkan pekerja itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Maizidah, kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku bisnis sering kali menjadi hambatan dalam perjuangan melindungi hak-hak pekerja migran:

"Biasanya kalau soal ada yang menentang kebijakan itu, mereka lebih pro terhadap para P3MI atau mereka yang menempatkan pekerja migran yang orientasinya adalah orientasi bisnis, bukan orientasi perlindungan" (Wawancara Februari, 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nugroho (2019), yang menemukan bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja migran sering kali lebih memperhatikan kepentingan bisnis dibandingkan perlindungan pekerja.

Meskipun berbagai tantangan terus dihadapi, perjuangan Maizidah Salas dalam membangun Kampung Pekerja Migran tetap menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan berbasis pengalaman dan solidaritas dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Keterbatasan finansial, kurangnya dukungan keluarga, beban ekonomi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pekerja migran tidak menghentikan upaya advokasinya. Sebaliknya, Maizidah terus mengembangkan strategi yang adaptif dan berbasis komunitas untuk memastikan bahwa pekerja migran, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki akses terhadap perlindungan dan keadilan yang lebih baik.

Kisah kepemimpinannya mencerminkan bagaimana perempuan akar rumput dapat memainkan peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, sejalan dengan

konsep kepemimpinan transformasional yang menekankan inspirasi, pemberdayaan, dan perubahan berbasis kolektif. Dalam konteks ini, perjuangan Maizidah tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada perubahan struktural yang lebih luas, termasuk revisi kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pekerja migran. Kampung Pekerja Migran tidak hanya menjadi ruang advokasi, tetapi juga simbol ketahanan dan keberanian pekerja migran dalam memperjuangkan hak-haknya. Keberhasilan Maizidah Salas menunjukkan bahwa meskipun aktivisme menghadapi banyak tantangan, dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan komunitas, perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan tetap dapat terwujud.

KESIMPULAN

Studi ini menyoroti bagaimana kepemimpinan transformasional yang dijalankan oleh Maizidah Salas telah menjadi katalisator perubahan sosial bagi komunitas pekerja migran perempuan di Wonosobo. Dengan pendekatan berbasis advokasi, edukasi, dan pemberdayaan komunitas, Maizidah berhasil menciptakan sistem perlindungan sosial bagi pekerja migran yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari kebijakan negara. Keberhasilannya dalam membangun Kampung Pekerja Migran menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada transformasi sosial dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Lebih jauh, studi ini mengonfirmasi bahwa pekerja migran perempuan menghadapi tantangan berlapis yang mencakup eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Dengan menerapkan teori kepemimpinan transformasional dan perspektif interseksionalitas, Maizidah Salas berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui penguatan jaringan sosial, peningkatan kesadaran komunitas, serta advokasi kebijakan yang lebih inklusif. Sebagai katalis dalam perjuangan pekerja migran, kepemimpinan Maizidah Salas tidak hanya menciptakan perubahan di tingkat komunitas tetapi juga memicu transformasi struktural yang lebih luas. Kepemimpinan berbasis pengalaman dan solidaritas komunitas yang ia jalankan telah menginspirasi pekerja migran lainnya untuk lebih sadar akan hak-hak mereka serta berani menyuarakan keadilan. Dengan keberadaannya sebagai katalis perubahan, gerakan pekerja migran yang sebelumnya termarginalisasi kini mulai memperoleh ruang yang lebih luas dalam diskursus kebijakan dan perlindungan sosial.

Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa model kepemimpinan yang berbasis pada pengalaman nyata dari kelompok rentan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mendorong perubahan kebijakan. Namun, meskipun upaya Maizidah berhasil dalam banyak aspek, hambatan struktural seperti bias gender dan resistensi dari pemangku kebijakan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program yang telah dibangun.

Implikasi dari studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana kepemimpinan berbasis nilai, kesadaran interseksional, dan strategi advokasi komunitas dapat memperkuat perjuangan kelompok marginal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi untuk memperkuat inisiatif seperti Kampung Pekerja Migran agar terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggaunitakiranantika. 2022. *Memahami Interseksionalitas dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)* 4(1): 48-55.
- Fakun Khairi, & Muzammil, S. 2024. *Sejarah dan Identitas Perempuan dalam Tasawuf: Sebuah Pendekatan Interseksionalitas. Spiritualita: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi Islam* 8(2).
- Herlina Permata Sari. 2005. *Analisis Interseksionalitas terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Jurnal Kriminologi Indonesia* 4(1): 7-13.
- Junaedi, Mahfudz. 2018. *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4(1).
- Kinasih, S. E., Koesbardiati, T., Wahyudi, I., & Ida, R. 2023. *Digital Media 'Application': A Parenting System among Children of Indonesian Migrant Workers. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences* 19(1): 87-98.
- Khafifi, A. 2023. *Studi Life History Pekerja Migran Perempuan dalam Sektor Informal di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Pemikiran Sosiologi* 10(2).
- Pusparani, S. P., & Soetjipto, A. W. 2017. *Perempuan dan upaya pemberdayaan diri: Studi kasus terhadap enam perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia. Jurnal Perempuan*, 22(3), 179-190.
- Sigiro, A. N. 2021. *Memajukan agenda konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tentang pencegahan kekerasan seksual di dunia kerja di Indonesia. Jurnal Perempuan*, 26(1), 63-77.

- Silvia, T., & Rahayu, S. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Mantan Pekerja Migran Korban Trafficking di Kabupaten Wonosobo*. *NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* 5(2): 175-184.
- Suryadi, Kasturi, & Yusmanto. 2022. *Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind)*. *Jurnal EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7(1): 126-141.
- Tjandraningsih, I. 2021. *Memikirkan Ulang Strategi Kesetaraan Gender di Organisasi Serikat Pekerja*. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 29-37.
- Wuryandari, R. D. (2022). *Perempuan dan Penerapan Etika Feminis dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 1–10.

E-Book

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. 2006. *Transformational Leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. 2011. "Gender and Leadership." In *The SAGE Handbook of Leadership*, edited by D. Collinson, K. Grint, & B. Jackson, 195-212. SAGE Publications.

Berita Online

- Sofian, Arnaz, & Arianto. 2016. "Sosok Minggu Ini: Salas, Mantan TKI Pendiri Kampung Migran." *Liputan6*. Diakses pada 26 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/2491217/sosok-minggu-ini-salas-mantan-tki-pendiri-kampung-migran>
- BP2MI. 2024. "Laporan Publikasi Tenaga Kerja Migran Tahun 2023." Diakses pada 2 Februari 2025. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-02-2024_Laporan_Publikasi_Tahun_2023.pdf
- Diskominfo Wonosobo. 2024. "Training Enumerator: Berdayakan Pekerja Migran Soal Ekonomi dan Perlindungan Sosial." Diakses pada 5 Februari 2025. <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/detail/training-enumerator-berdayakan-pekerja-migran-soal-ekonomi-dan-perlindungan-sosial>
- For Justice Without Borders. 2024. "Justice Without Borders dan Kita Institute Wonosobo Kupas Tuntas Tantangan Pekerja Migran Kala Pandemi." Diakses pada 9 Februari 2025. <https://forjusticewithoutborders.org/justice-without-borders-dan-kita-institute-wonosobo-kupas-tuntas-tantangan-pekerja-migran-kala-pandemi/>
- Komnas Perempuan. 2024. "Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM." Diakses pada 3 Februari 2025. <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-ham-pekerja-migran-and-mekanisme-penanganan-korban-pelanggaran-ham>
- Liputan6. 2024. "Pekerja Migran Kerap Alami Kekerasan hingga Sandang Disabilitas Bahkan Kematian." Diakses pada 8 Februari

2025. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5534540/pekerja-migran-kerap-alami-kekerasan-hingga-sandang-disabilitas-bahkan-kematian>
- Parapuan. 2022. "Maizidah Salas, Penyintas Human Trafficking Pendiri Kampung Pekerja Migran." Diakses pada 11 Februari 2025. <https://www.parapuan.co/read/533082053/maizidah-salas-penyintas-human-trafficking-pendiri-kampung-pekerja-migran>
- SBMI. 2024. "Peringatan Hari Perdagangan Orang Sedunia 2024: Potret Buruk Penanganan Kasus Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran." Diakses pada 7 Februari 2025. <https://sbmi.or.id/peringatan-hari-perdagangan-orang-sedunia-2024-potret-buruk-penanganan-kasus-perdagangan-orang-terhadap-pekerja-migran/>
- Tribun Jateng. 2024. "Penipuan Kerja Luar Negeri: 5 Pencari Kerja Asal Wonosobo Batal Terbang ke Serbia." Diakses pada 14 Februari 2025. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/21/penipuan-kerja-luar-negeri-5-pencari-kerja-asal-wonosobo-batal-terbang-ke-serbia>
- Kompas. 2024. "95 Persen Pekerja Migran RI di Luar Negeri Korban Kerja Nonprosedural." Diakses pada 12 Februari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/26/20262621/95-persen-pekerja-migran-ri-di-luar-negeri-korban-kerja-nonprosedural>
- Antara News. 2018. "Mantan TKI Wonosobo Terima Penghargaan TIP Report Hero dari Pemerintah AS." Diakses pada 6 Februari 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/745126/mantan-tki-wonosobo-terima-penghargaan-tip-report-hero-dari-pemerintah-as>